

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI NON KONSENSUAL (*REVENGE PORN*) MELALUI
MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA
BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Gita Ranjani

1183050053

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

1443 H/2022M